

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA (SID) MELALUI
WEBSITE OPENSID DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN WAWAY
KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

DINDA MUHARENI

1846041002



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA (SID) MELALUI *WEBSITE* OPENSID DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

DINDA MUHARENI

Pembangunan desa menjadi salah satu penentu pergerakan pembangunan nasional. Sebagai salah satu bentuk kepedulian pembangunan perdesaan, *smart village* dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Di Desa Sumber Rejo, penerapan *smart village* baru mencapai tahap *smart government* dimana tahap ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan *website* OpenSID sebagai wadah dari sistem informasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait implementasi kebijakan sistem informasi desa berbasis website OpenSID. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik dengan menunjukkan keseriusan persiapan tim organisasi pelaksana dan sumber daya, variabel interpretasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana proses interpretasi baik dari badan pembuat kebijakan kepada badan pelaksana maupun badan pelaksana kepada kelompok sasaran, dan variabel aplikasi sudah dilakukan dengan baik, meskipun terjadi halangan berupa keterbatasan skill IT, hal ini tidak menghalangi keberhasilan implementasi sistem informasi desa berbasis OpenSID. Sebagai saran, aparatur pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan dasar penggunaan teknologi informasi seperti memasukkan, menyimpan dan mengelola informasi.

Kata Kunci : Implementasi, *Smart village*, Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE INFORMATION SYSTEM WITH THE OPENSID WEBSITE BASED IN SUMBER REJO VILLAGE, WAWAY KARYA DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY

By

DINDA MUHARENI

The development of villages has become one of the determinants of national development. As a form of concern for rural development, the *Smart village* program was introduced by the Provincial Government of Lampung. In Sumber Rejo village, the implementation of *Smart village* has only reached the Smart Government stage which is the goal is to carry out governance through the OpenSID website as a platform for the village information system. This research aims to obtain a description and analysis related to the implementation of the village information system policy based on the OpenSID website. The approach used is a qualitative approach with a descriptive method. This research technique involves interviews and documentation using Charles O. Jones policy implementation model. The research results indicate that, in terms of the Organization variable, it has been implemented well, demonstrating the seriousness of the preparation of the implementing organization's team and resources. The Interpretation variable has also been well implemented, with a good interpretation process from policy-making bodies to implementing bodies as well as from implementing bodies to target groups. The Application variable has been carried out well, although there were obstacles in the form of limited IT skills. However, this did not hinder the success of implementing the village information system based on OpenSID. As a suggestion, village government officials need to improve their basic skills in using information technology, such as entering, storing, and managing information.

Keywords : Implementation, *Smart village*, Village

**“ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA (SID)
MELALUI *WEBSITE* OPENSID DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN
WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

Oleh:

**Dinda Muhareni
NPM: 1846041002**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: ANALISIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI DESA (SID)
MELALUI WEBSITE OPENSID DI
DESA SUMBER REJO KECAMATAN
WAWAY KARYA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa

: Dinda Muhareni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1846041002

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

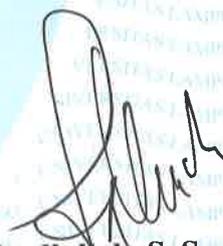
Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI
Komisi Pembimbing**

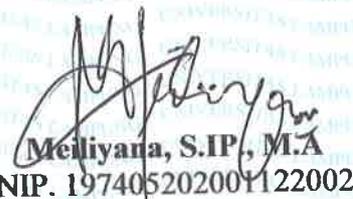


Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001



Dodi Faedlulloh, S. Sos., M. Si.
NIP. 198807122019031012

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Dian Kagungan. M.H

Sekretaris : Dodi Faedlulloh S.Sos, M.Si

**Penguji
Bukan
Pembimbing : Prof. Dr. Noverman Duadji. M.Si**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Dinda Muhareni
NPM 1846041002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dinda Muhareni. Penulis lahir di Kota Tangerang pada tanggal 4 Juni 2000. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Muharam dan Ibu Endra Suryani. Pada tahun 2004, penulis menempuh pendidikan formal TK Darul Ulum sampai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di MI Darul Ulum sampai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Waway Karya sampai pada tahun 2015. Terakhir penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMA N 1 Waway Karya sampai pada tahun 2018.

Pada bulan Agustus 2018, penulis resmi tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Selain itu, penulis juga pernah menjadi anggota (UKM-U) UKMBS Unila di bidang Seni Rupa. Pada tahun 2021, penulis mengikut kegiatan Kerja Kuliah Nyata (KKN) di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Pada tahun 2022, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung di Sub Bidang Penetapan.

MOTTO

“Courage is grace under pressure”

(Ernest Hemmingway)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d : 11)

“We are not determined by our experiences, but are self-determined by the meaning we give to them and when we take particular experiences as the basis for our future life, we are almost certain to be misguided to some degree. Meanings are not determined by situations. We determine ourselves by the meanings we ascribe to situations.”

(Alfred Alder)

“Saya percaya bahwa apapun pilihan hidup yang dipilih pasti akan menemui pahit-manisnya tersendiri. Oleh karena itu jangan terlalu menyesal”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah limpahkan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini kupersembahkan dengan rendah hati kepada :

Ibu dan Bapakku Tercinta

Ibu Endra Suryani dan Bapak Muharam

Yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dengan ikhlas dan tanpa lelah. Rasa terima kasih ini tidak terhitung karena pengorbanan merawat, mendidik dan membesarkan penulis tanpa syarat apapun. Tiada hentinya saya selalu bersyukur kepada Allah SWT karena dilahirkan dari orang tua dengan pengalaman yang hebat dan mengajarkan saya untuk tidak pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Sebuah anugrah yang tidak tergantikan dengan apapun.

Terima kasih untuk seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, Staf dan teman-teman seperjuangan. Khususnya untuk Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan skripsi ini. Saya menyadari bahwa kemampuan saya jauh dari kata sempurna sehingga saya butuh bimbingan dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing dan Pembahas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan untuk saya sendiri, terima kasih telah memilih untuk tetap kuat dalam melanjutkan dan menjalankan skripsi ini. Saya belajar banyak untuk menghadapi kehidupan dan menghargai kerja keras melalui proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Almamater Tercinta,
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya tanpa henti serta memberikan saya kekuatan sehingga saya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Melalui Website OpenSID di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saya menyadari kemampuan penulis jauh dari kata sempurna sehingga proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu dan Bapakku tercinta, Ibu Endra Suryani dan Bapak Muharam. Saya sangat bersyukur telah dilahirkan dari orang tua dengan pengalaman yang luar biasa dan selalu mengajarkan saya tentang pentingnya untuk tegar menjalani hidup. Terima kasih atas pengorbanan dalam memberikan dukungan dan doa tanpa lelah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembimbing utama penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, kebaikan dan bimbingan yang ibu berikan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT melindungi ibu dan membalas semua kebaikan yang ibu berikan kepada saya.

7. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan waktu, ilmu dan bimbingan yang bapak berikan untuk penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi bapak dan membalas semua kebaikan yang bapak berikan.
8. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen penguji utama penulis. Terima kasih atas kesediaan waktu bapak dalam membimbing dan memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki kekurangan pada skripsi saya. Semoga Allah SWT melindungi bapak dan membalas semua kebaikan yang bapak berikan.
9. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih telah senantiasa baik hati untuk membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sekali lagi, semoga Allah SWT melindungi ibu dan membalas semua kebaikan yang telah ibu berikan.
10. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas semua ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga amalan bapak dan ibu dosen berikan dibalas dengan pahala oleh Allah SWT dan semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi bekal yang baik bagi penulis di kehidupan bermasyarakat nanti.
11. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih telah membantu dalam memberikan pelayanan administrative yang baik bagi penulis sejak awal penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
12. Bapak Muharram selaku Kepala Urusan Umum, Bapak Ahmad Kurniawan selaku Operator Desa, dan Bapak Edi Kurniawan selaku Sekretaris Desa dari Pemerintah Desa Sumber Rejo. Terimakasih telah memberikan masukan dan informasi yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Yohanes Sulistiono, SE., MM selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas PMDT Provinsi Lampung. Terima kasih atas keramahtamahan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Bapak Heri Setiawan S.Kom selaku IT Operation dari Tim DJCorp. Terima kasih atas keramahtamahan bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman saya yang telah bersedia menjadi mahasiswa pembahas dan moderator pada seminar proposal dan seminar hasil saya, Rika Nuraini, Egi Yunitasari, Esy Anggraeni, Eldo Novrizal, dan Rani Dea Safitri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi mahasiswa pembahas dan moderator pada seminar proposal dan seminar hasil saya. Tanpa kalian, seminar proposal dan seminar hasil saya tidak akan berjalan sempurna. Semoga Allah memudahkan kalian di setiap urusan.
16. Teman-teman pembimbing saya, Diah Ayu Widyaningrum, Ega Putrina, Rani Dea Safitri dan teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi teman pembimbing dan meluangkan banyak waktu untuk masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa terbantu sekali dengan masukan dari kalian. Maaf ya kalau saya sudah merepotkan kalian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
17. Teman-temanku yang telah bersama sejak maba, Felisitas Sri Sesanti, Kuswandi dan Rama Ardiansyah. Terima kasih telah menjadi bagian dari kenangan saya sedari awal menjalani pendidikan di Ilmu Administrasi Negara. Meski kalian tidak berada di jurusan ini lagi, tetap tabah dan semangat untuk kedepannya. Kita semua sedang berproses dengan alur kehidupan masing-masing. Jalani hidup kalian dengan cara terbaik kalian.
18. Teman-teman seperjuanganku, Rani, Esy, Else, Rika dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih telah memberikan

saya kekuatan untuk tetap bertahan selama penyelesaian skripsi ini. Semoga kalian diberi kelancaran oleh Allah SWT di setiap urusan.

19. Teman-teman internet saya, Adel, Hadi, Nisa, Sandrina dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan disini. Terima kasih sudah memberikan saya kekuatan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat dari saya. Semoga kalian diberi kelancaran di setiap urusan.
20. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terimakasih
21. Untuk saya sendiri. Dinda, terima kasih sudah tetap bertahan melanjutkan skripsi ini ditengah tekanan dan kecemasan. Melalui skripsi ini, saya menjadi belajar untuk lebih menghargai diri saya sendiri, orang-orang disekitar saya dan kerja keras saya sendiri.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Dinda Muhareni

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR TABEL	16
DAFTAR GAMBAR.....	17
I. PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	26
2.3 <i>E-government</i>	36
2.4 Sistem Informasi Desa dan Website OpenSID.....	41
2.5 Kerangka Berpikir	44
III. METODE PENELITIAN	46
3.1 Desain Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian	46
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Jenis Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	51

3.7	Teknik Keabsahan Data.....	52
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1	Gambaran Umum	54
4.1.1	Gambaran Umum Desa Sumber Rejo.....	54
4.1.2	Gambaran Umum Pemerintah Desa Sumber Rejo	59
4.1.3	Gambaran umum Sistem Informasi Desa Berbasis OpenSID di Desa Sumber Rejo	65
4.2	Hasil Penelitian.....	70
1.	Organisasi	70
2.	Interpretasi	76
3.	Aplikasi.....	83
4.3	Pembahasan	90
1.	Organisasi	92
2.	Interpretasi	97
3.	Aplikasi.....	108
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	117
5.1	Kesimpulan.....	117
5.2	Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2. Informan Penelitian.....	50
Tabel 3. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	51
Tabel 4. Pengalokasian pertanahan di Desa Sumber Rejo.....	54
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Sumber Rejo.....	55
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Sumber Rejo.....	56
Tabel 7. Data kelompok umur dari penduduk Desa Sumber Rejo.....	56
Tabel 8. Data tingkat pendidikan penduduk Desa Sumber Rejo.....	57
Tabel 9. Data mata pencaharian penduduk Desa Sumber Rejo.....	58
Tabel 10. Alokasi Belanja Penyelenggaraan <i>Smart Village</i> Desa Sumber Rejo.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.	Kerangka Berpikir.....	45
Gambar 2.	Dokumen rencana anggaran biaya pemerintah Desa Sumber Rejo terhadap pembiayaan penyelenggaraan Program <i>Smart village</i>	60
Gambar 3.	Peralatan untuk penyelenggaraan <i>Smart village</i> di Balai Desa Sumber Rejo.....	75
Gambar 4.	Pelaksanaan sosialisasi <i>Smart village</i> yang diselenggarakan di Balai Desa Ngesti Karya.....	77
Gambar 5.	Dokumen Peraturan Surat Keputusan 41/007/SK/20.2002/2022 sebagai dokumen resmi pelaksanaan <i>smart village</i> di Desa Sumber Rejo.	78
Gambar 6.	Surat Perjanjian Kerjasama Antar Desa Sumber Rejo dengan Darmajaya Digital Solusi.....	78
Gambar 7.	Pelaksanaan BIMTEK dari tim <i>Smart village</i> pada tanggal 27 Mei di Hotel Kurnia 2.....	79
Gambar 8.	Modul Panduan untuk pengelolaan Website OpenSID.....	80
Gambar 9.	Tangkapan layar forum Grup <i>WhatsApp smart village</i> yang disediakan oleh tim <i>smart village</i>	81
Gambar 10.	Sosialisasi Program <i>Smart village</i> melalui Musyawarah Masyarakat Desa	82
Gambar 11.	Dokumen surat penawaran harga dari tim <i>Smart village</i> yang memuat fasilitas jasa informasi teknologi yang berkaitan dengan website OpenSID	84
Gambar 12.	Tampilan Website OpenSID Desa Sumber Rejo.....	86
Gambar 13	Operator desa yang sedang memandu warga dalam menggunakan anjungan OpenSID.....	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era saat ini, kemajuan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Data menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi keempat dalam penggunaan internet, dengan jumlah mencapai 224,01 juta pengguna, sedangkan peringkat pertama dipegang oleh Tiongkok dengan angka mencapai 1.047,4 miliar pengguna (statista.com, 2022). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah mencapai tingkat melek teknologi yang tinggi. Penggunaan internet yang luas dengan jumlah pengguna yang besar menunjukkan bahwa teknologi informasi telah meresap ke dalam berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, pembangunan nasional semakin memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah termasuk unit terkecilnya yaitu pedesaan. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari pedesaan, mencapai jumlah 83.794 desa dan kota, dengan 98 kota (databoks.katadata.co.id, 2022). Fakta ini mencerminkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia didominasi pedesaan dengan persentase 99%. Dengan persentase tersebut, peran pembangunan desa menjadi salah satu penentu utama kemajuan pembangunan negara. Pembangunan yang dilakukan secara fundamental dari unit terkecil ini akan memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan dalam skala yang lebih besar.

Dalam era perkembangan digital yang pesat, pembangunan daerah tidak lepas dari inovasi digital yang dikenal sebagai *e-government*. *E-government* diartikan sebagai peralihan dari pendekatan konvensional menuju digitalisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik sistem manual berbasis penggunaan kertas berubah menjadi sistem berbasis digital. Selain itu, transformasi ini juga mencakup adaptasi gaya kepemimpinan yang baru, proses pengambilan keputusan yang diperbarui, strategi yang inovatif, serta metode baru dalam mengatur dan menyampaikan informasi antara entitas pemerintahan, masyarakat, mitra bisnis, dan staf (Solinthone & Rummyantseva, 2016).

Peran *e-government* sangat besar dalam membantu meringankan kegiatan pelayanan publik. Menurut *Organization For Economic Co-operation And Development* (OECD), peran signifikan dari *e-government*, antara lain 1) meningkatkan efisiensi pelayanan; 2) meningkatkan mutu pelayanan; 3) membantu pencapaian kebijakan publik; 4) berkontribusi atas sasaran kebijakan ekonomi; 5) berkontribusi pada reformasi; 6) meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Mandagi, 2023). Dibandingkan dengan metode manual, implementasi pelayanan berbasis digital memiliki kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu pelayanan. Proses pelayanan yang mengadopsi pendekatan digital cenderung meminimalkan biaya operasional, mengurangi durasi pelaksanaan, memberikan aksesibilitas yang lebih luas, dan menjadikan efisiensi digital sebagai elemen penting dalam menyederhanakan sistem operasional yang kompleks. Selain itu, *e-government* memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi yang dihasilkan oleh *e-government* memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam memantau pelaksanaan pelayanan publik.

Sistem informasi desa merupakan bagian dari *e-government*. Dalam arti luas, Sistem Informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian yang meliputi mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan dengan tujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas yaitu desa (Nasir dkk., 2013). Kebijakan Sistem Informasi Desa di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86.

Pemerintah desa maupun masyarakat berhak mengakses menyediakan informasi milik desa seperti pembangunan desa, profil desa dan informasi terkait administrasi desa. Informasi sudah menjadi hal yang mendasar bagi suatu pembangunan. Bagi pemerintah desa, informasi desa dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, melaksanakan pembangunan dan melakukan evaluasi pada skala desa. Sedangkan bagi masyarakat, partisipasi dapat tercipta dengan adanya transparansi informasi.

Di Provinsi Lampung, implementasi Sistem Informasi Desa diwujudkan melalui pemanfaatan website OpenSID. Website OpenSID menjadi sarana utama yang menyelenggarakan seluruh program *smart village* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung No 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung periode 2020-2024.

Implementasi *smart village* di Desa Sumber Rejo diatur pada peraturan 141/007/SK/20.2002/2022 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2022. Di Kecamatan Waway Karya, sebanyak 10 dari 11 desa telah menyediakan layanan Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID. Penelitian memilih Desa Sumber Rejo sebagai fokus penelitian karena menjadi satu-satunya desa yang aktif dalam mengelola sistem informasi desa berbasis *website* OpenSID dari desa lainnya. Desa Sumber Rejo aktif yang dalam mengelola *website* OpenSID yang terlihat dari pengunggahan informasi terkini lebih rutin dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Waway Karya. Fenomena ini menyoroti keseriusan aparat Desa Sumber Rejo dalam memastikan kelancaran dan aktualitas informasi di platform OpenSID.

Berdasarkan wawancara pra-riset yang penulis lakukan pada tanggal 1 September 2022, penulis menemukan beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID. Berdasarkan wawancara dengan 3 orang dari anggota masyarakat pada tanggal 1 September 2022, secara umum mereka merasa tidak

mengetahui adanya OpenSID karena minimnya sosialisasi dari pemerintah desa sehingga partisipasi masyarakat yang ditimbulkan masih minim. Menurut Pemerintah Desa Sumber Rejo, minimnya sosialisasi dikarenakan aparatur desa memandang masyarakat memiliki kesibukan di sektor lain sehingga masyarakat sulit untuk meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi. Selain itu, Pemerintah Desa Sumber Rejo masih ragu untuk menerapkan implementasi *smart village* karena aparatur pemerintah desa tidak mendapatkan bimbingan lanjut pasca BIMTEK sehingga aparatur pemerintah desa kebingungan dalam menjalankan implementasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* OpenSID di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan publik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan sistem informasi desa melalui *website* OpenSID diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala kompleks yang terjadi dalam sistem manual. Minimnya keterampilan para aparatur desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat juga dapat berdampak pada kesuksesan implementasi. Dengan judul "Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Website OpenSID di Desa Sumber Rejo," peneliti berupaya memahami proses implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID di Desa Sumber Rejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis *Website* OpenSID di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan Rumusan Masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis *Website* OpenSID di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangsih pemikiran untuk ranah pembelajaran ilmu administrasi negara khususnya untuk kajian yang membahas tentang implementasi kebijakan publik dan pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kontribusi dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Sumber Rejo agar dapat lebih menyempurnakan dan meningkatkan hasil implementasi atas penyelenggaraan pemerintahan sistem informasi desa melalui *website* OpenSID kepada masyarakat desa. Diharapkan implementasi sistem informasi desa berbasis OpenSID mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat yang berhubungan dengan informasi desa. Masyarakat juga dapat lebih terinformasikan dengan adanya penyediaan pelayanan publik melalui sistem informasi desa ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu data pendukung yang dijadikan dasar maupun acuan untuk sebuah penelitian agar penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan langkah-langkah sistematis. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis antara lain :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
(Syahrin dkk, 2023)	Implementasi Aplikasi Sidewo dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kalurahan Wonokerto	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Wonokerto masih kurang. Hal ini diakibatkan oleh faktor kualitas pemerintahan padukuhan setempat. Minimnya pembinaan dan bim terkait penggunaan SIDEWO menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat dalam	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas implementasi kebijakan terhadap sistem informasi desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan model implementasi Edward 3 yang berfokus pada faktor pengaruh

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>menggunakan aplikasi SIDEWO. Selain itu dari faktor masyarakat, banyak dari mereka yang belum menggunakan alat komunikasi elektronik dan berusia lanjut usia sehingga mereka tidak memahami penggunaan teknologi.</p>	<p>keberhasilan implementasi sedangkan penelitian ini menggunakan model implementasi dari Charles O. Jones yang mengacu pada identifikasi tahapan dalam kegiatan implementasi.</p>
(Iriani dkk., 2022)	<p>Analisis Dampak Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Terhadap Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, masyarakat merasa implementasi Sistem Informasi Desa sudah maksimal. Pada tingkat pemahaman website, sebanyak 85,7% masyarakat memahami dengan baik dan 14,29% masyarakat kurang memahami dengan baik. Untuk tingkat kemudahan pengguna, 71,43% masyarakat sudah memahami aplikasi dengan baik. Untuk pemahaman kualitas informasi, terdapat 28,57% dari masyarakat mengatakan kualitas sangat baik, 42,86%</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti terdahulu meneliti tentang fokus yang lebih spesifik dimana penelitian terdahulu memiliki fokus yang spesifik terhadap penilaian masyarakat terkait implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini berfokus pada</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		dari masyarakat mengatakan kualitas baik, dan 28,57% masyarakat mengatakan kualitas cukup. Pada segi interaksi layanan, seluruh peserta menilai sudah sangat baik.	penelitian implementasi kebijakan sistem informasi desa berbasis website OpenSID
(Suryani, 2019)	Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul berhasil menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan website desa yang berisi informasi-informasi desa termasuk program kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. Dari segi good government, pemerintah desa telah melakukan dengan baik. Terlihat dari adanya penggalakkan budaya kedisiplinan dan reformasi birokrasi pemerintah desa yang bertujuan untuk meminimalisir budaya suap dan pungli.	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada fokus penelitian yang menyangkut tentang sistem informasi desa. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yang lebih spesifik pada peran pemerintah desa dalam mewujudkan good governance sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada implementasi sistem informasi desa.

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>Namun terdapat hambatan antara lain adanya keterbatasan sumber daya manusia dimana pemerintah desa kesulitan memahami peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi desa serta masyarakat desa yang kurang aktif dalam berpartisipasi dalam penerapan kebijakan dan pengawasan penerapan kebijakan.</p>	

Sumber : Diolah Peneliti

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap realisasi untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Howlet, Ramesh dan Perl mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dari 5 tahapan penting yaitu penetapan agenda, perumusan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Suatu kebijakan akan memasuki tahap implementasi jika sebelumnya kebijakan tersebut telah dipertimbangkan, dirumuskan dan diadopsi (Wheat, 2010).

Van Horn dan Van Meter memandang implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan. Namun Edwards III memandang

implementasi kebijakan sebagai sekumpulan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang merasakan dampaknya (Kasmad, 2013). Dari pandangan oleh kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sekumpulan tahapan tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan cara untuk suatu kebijakan agar mencapai tujuannya. Chief J.O. Udoji dalam mengemukakan bahwa suatu kebijakan hanya menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan karena implementasi kebijakan sama pentingnya dengan pembuatan kebijakan. Hal ini tidak lain karena kebijakan publik memang diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kasmad, 2013).

Pada awalnya, studi terkait implementasi kebijakan dipandang kurang penting oleh para ahli karena dianggap sebatas pelaksanaan terkait apa yang tertulis dalam kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun pada praktiknya, kegiatan implementasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurut Eugene Bardach (1977) dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game* berpendapat bahwa aksi penerapan kebijakan tidak mudah dalam pelaksanaan. Suatu rumusan kebijakan yang sudah dirancang seideal mungkin dengan menyesuaikan permasalahan yang ada akan mengalami kesulitan dalam realisasinya demi memuaskan target kebijakan publik (Kasmad, 2013). Pendapat ini didukung oleh Merille S Grindle yang berpendapat bahwa implementasi bukan hanya pada bagaimana penjabaran sebuah keputusan pemerintah kedalam birokrasi aksi nyata semata, melainkan juga mencakup persoalan konflik, keputusan serta siapa saja yang memperoleh apapun dari kebijakan itu baik tugas maupun dampak yang diterima (Hiplunudin, 2017). Artinya, meskipun peraturan telah ditetapkan, implementasi tidak

selalu sesuai dengan rencana dan ekspektasi awal. Implementasi akan selalu menemui berbagai kendala yang dapat berpotensi pada kegagalan implementasi jika tidak disikapi dengan baik.

Menurut Wahab (2007), lazimnya resiko gagal terhadap suatu kebijakan disebabkan oleh faktor pelaksanaan yang buruk (*bad execution*), kebijakan yang buruk (*bad policy*) dan nasib yang tidak beruntung (*bad luck*). Selain itu, menurut Saefullah (1999) potensi kegagalan kebijakan terletak pada perbedaan antara kebijakan dan kemampuan pelaksanaan itu sendiri. Terdapat dua faktor antara lain : 1) perumus kebijakan kurang memahami kondisi di lapangan, 2) informasi yang digunakan tidak mengalami pembaharuan. Kelemahan lainnya timbul dari faktor lemahnya birokrasi pemerintah yang timbul dari rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki. Lemahnya sumber daya manusia pada birokrat berpengaruh pada bagaimana kemampuan mereka dalam melaksanakan kebijakan publik di lapangan (Hiplunudin, 2017).

Pemaparan diatas dapat menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya tahap realisasi dari peraturan yang telah ditetapkan namun juga termasuk dinamika-dinamika di dalamnya baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan belum tentu menjamin kelancaran pada proses implementasi. Karena itulah implementasi tidak bisa dipandang sepele dalam proses kebijakan publik (Hiplunudin, 2017).

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model-model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Model Van Horn dan Van Meter

Model ini merupakan model dengan pendekatan *top-down* pertama dalam sejarah perkembangan model implementasi kebijakan generasi kedua. Model ini diperkenalkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn (1975) dalam tulisan yang berjudul "*The Policy*

Implementation Process” dalam jurnal yang berjudul “*Administration and Society*”. Model ini dikembangkan dari model pendahulunya, Pressman dan Wildavsky yang sebelumnya memelopori kajian implementasi kebijakan pada generasi pertama (Kasmad, 2013). Dengan mengembangkan pendahulunya tersebut, Van Horn dan Van Meter membentuk model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down*. Meskipun menggunakan pendekatan *top-down*, Van Horn dan Van Meter terlihat berusaha membenahi kekurangan dari pendekatan *top-down*. Pendekatan *top-down* menitikberatkan pada pemberian amanat dari hirarki atas sehingga pendekatan ini mengabaikan pihak lain selain pihak hirarki atas seperti birokrat garda depan, pihak swasta atau kelompok sasaran. Van Horn dan Van Meter berusaha memperhatikan kesiapan birokrasi garda depan dan pihak swasta dalam kajian implementasi kebijakan. Meskipun begitu, model ini tidak memberi perhatian pada kelompok sasaran (Kasmad, 2013).

Sama seperti penganut pendekatan *top-down* pada umumnya, van Meter dan van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai tindakan yang baru bisa dilakukan jika keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-undang memuat rancangan kegiatan, fasilitas, rincian dana akan dilaksanakan dan harus tidak boleh melewati batas peraturan tersebut. Jika ketetapan tidak jelas, implementasi kebijakan tidak bisa dilaksanakan. (Kadji, 2015).

Terdapat 6 variabel dalam model Van Horn dan Van Meter. Sekilas model ini terlihat mirip dengan model dari Edwards III, namun yang menjadi pembeda adalah model Van Meter dan Van Horn memiliki penegasan akan pentingnya unsur kondisi sosial, ekonomi dan politik dari eksternal serta identifikasi tujuan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi. Berbeda dengan model Edward 3 yang mengemukakan variabelnya dengan setara, model

Van Horn dan Van Meter mengemukakan variabel dari teorinya secara horizontal, dimana terdapat 2 (dua) variabel dasar yaitu standar dan sasaran kebijakan serta sumber daya. Kedua variabel tersebut akan mempengaruhi 4 (empat) variabel lainnya yaitu komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, social dan politik serta kecenderungan badan pelaksana. Berikut variabel dalam model Van Horn dan Van Meter (Kasmad, 2013) :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)

Tujuan kebijakan harus jelas agar para pelaksana kebijakan tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Jika terjadi intepretasi berbeda dari para pelaksana, maka akan berdampak pada kegagalan dalam implementasi.

b. Sumber Daya (*Policy Resources*)

Sumber daya mencakup finansial, materi, manusia dan insentif yang memfasilitasi implementasi kebijakan. Insentif biasanya berbentuk pemberian hadiah sebagai apresiasi bagi mereka yang menjalankan tugasnya dengan benar serta sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan dinilai sangat vital. Pada dasarnya komunikasi merupakan hal yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia termasuk suatu organisasi. Dalam implementasi kebijakan, para pelaksana harus berkomunikasi sebaik mungkin agar informasi yang diterima dan tidak terjadi kesalahan intepretasi. Jika terjadi kesalahan pemahaman, maka akan berakibat vatal dan berpotensi pada kegagalan implementasi.

d. Karakteristik badan pelaksana (*The Characteristic of the Implementing Agencies*)

Karakteristik dari badan pelaksana juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Ripley, terdapat 6 karakteristik yaitu :

- 1) Kompetensi dan ukuran staf lembaga
- 2) Tingkat pengendalian hirarkis terhadap keputusan subunit dan proses dalam lembaga pelaksana
- 3) Sumber daya politik lembaga seperti dukungan dari birokrasi atas
- 4) Dorongan dari organisasi
- 5) Komunikasi yang terbuka (yaitu komunikasi yang terjadi secara horizontal dan vertical dalam suatu organisasi)
- 6) Hubungan antar lembaga formal maupun informal yang terhubung dalam penegakan kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)

Faktor lainnya yang menjadi perhatian implementasi kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik. Jika lingkungan ekonomi, sosial dan politik tidak kondusif akan mempengaruhi faktor lainnya dan berdampak pada kegagalan implementasi.

f. Disposisi Implementor (*The Disposition of Implementors*)

Sikap dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi hasil dari implementasi. Sikap tersebut dipengaruhi dari pandangan terhadap suatu kebijakan dan pandangan terhadap kepentingan organisasinya maupun kepentingan pribadi. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat tiga unsur dalam mempengaruhi kemampuan melaksanakan implementasi, yaitu mengetahui suatu kebijakan (*the cognition of the policy*), pemahaman terhadap kebijakan dimana respon akan menjadi menerima,

netral atau menolak (*acceptance, neutrality, rejection*), dan intensitas dari respon tersebut (*the intensity of that response*).

2. Model George C. Edward III

Edwards III mengartikan implementasi sebagai tahapan yang terdapat diantara penyusunan kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut. Bagi Edwards III, masalah utama implementasi kebijakan adalah terletak pada perhatian pada implementasi kebijakan. Model Edwards III dikategorikan sebagai model *top-down* karena fokus utama dari model ini adalah kinerja dari badan pelaksana yang berdasarkan atas keputusan pemerintah pusat. Terdapat empat variabel dalam model ini : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel komunikasi dan sumber daya merupakan dampak langsung sedangkan disposisi dan struktur organisasi merupakan dampak tidak langsung (Kasmad, 2013).

Model ini dicetuskan oleh George C. Edwards III dalam buku yang berjudul “Implementing Public Policy”. Pendekatan awalnya dilakukan dengan pertanyaan “apa saja yang menjadi keharusan agar implementasi dapat berjalan baik?” dan “apa yang menjadi faktor kesuksesan suatu implementasi?”. Terbentuklah 4 variabel sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut (Kadji, 2015). Sekilas, model Edwards III memiliki variabel yang mirip dengan model van Meter dan van Horn. Namun Edwards III memangkas 6 variabel menjadi 4 variabel sehingga menjadikan model Edwards III lebih berfokus pada kegiatan dari badan pelaksana itu sendiri. Selain itu, model Edwards III juga bersifat setara, tidak seperti model Van Horn dan Van Meter yang bersifat horizontal (Kasmad, 2013).

a. Komunikasi (*communication*)

Menurut Edwards III, agar implementasi menjadi efektif, para pelaksana bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah diperintahkan. Perintah yang diterima haruslah jelas, konsisten

dan akurat agar tidak terjadi kesalahan. Jika keputusan yang diterima tidak maksimal maka akan terjadi kesalahpahaman dan kebingungan oleh seorang pelaksana yang berpotensi berakibat serius. Oleh karena itu faktor komunikasi merupakan faktor serius dalam penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Kadji, 2015). Terdapat tiga indikator untuk mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Agustino, 2006)

b. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya meliputi staf yang mumpuni, informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan, serta kewenangan yang bertanggung jawab, serta fasilitas yang cukup (Agustino, 2006) .

c. Sikap birokrasi (*disposition*)

Selain faktor komunikasi dan sumber daya, disposisi merupakan faktor yang dibutuhkan dalam implemementasi kebijakan publik. Supaya berjalan efektif, para pelaksana kebijakan juga harus memiliki motivasi dan dan sikap positif untuk menjalankan tugasnya. Hal ini karena para pelaksana memiliki sifat independensi dalam proses implementasi kebijakan dan kompleksitas masalah dari kebijakan tersebut. Meskipun telah ada aturan dan standar, pada akhirnya para implementor menjalankan tugasnya dengan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Sikap tersebut akan mempengaruhi kinerja kebijakan publik serta dampaknya bagi sekitar dan organisasi mereka sendiri (Kadji, 2015). Selain itu, Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam variabel sikap birokrasi, antara lain (Agustino, 2006) :

1) Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrasi sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Implementasi kebijaka membutuhkan personel yang berkompeten dalam

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pengangkatan birokrasi harus pada orang yang tepat yang berdedikasi penuh dalam melaksanakan tugasnya (Yunus & Aljurida, 2021).

2) Insentif

Insentif berguna untuk mengatasi pemasalahan dari sikap para pelaksana. Insentif dilakukan dengan cara menambah keuntungan tertentu sebagai motivasi para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya (Yunus & Aljurida, 2021).

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Variabel ini berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang terhadap implementor pelaksana kebijakan. Umumnya terbagi atas fragmentasi dan Standard Operating Procedures (SOP). Fragmentasi berhubungan dengan koordinasi antar unit di suatu organisasi pemerintahan. Sedangkan Standard Operating Procedures berkaitan dengan pembagian langkah-langkah dalam suatu kegiatan yang harus dipatuhi oleh setiap implementor yang terlibat. (Kadji, 2015).

3. Model Charles O. Jones

Model ini diperkenalkan oleh Charles O. Jones (1996) dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to The Study of Public Policy”. Sama seperti penganut pendekatan top-down lainnya, Charles O. Jones memandang bahwa implementasi kebijakan sebagai upaya pelaksanaan yang efektif sehingga implementasi kebijakan menyangkut pada kegiatan program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta manfaatnya dapat dilihat oleh kelompok sasaran (Kasmad, 2013). Ini berarti Charles O. Jones sendiri mengemukakan bahwa kebijakan publik memiliki komponen-komponen sebagai berikut (Kadji, 2015) :

- a. *Goals*, menentukan tujuan yang diinginkan
- b. *Plans*, menentukan perencanaan untuk mencapai tujuan

- c. *Programs*, menentukan tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- d. *Decision*, pengambilan keputusan dari tujuan, rencana, pelaksanaan program serta evaluasi program.
- e. *Effect*, berkaitan dengan dampak dari program implementasi baik sengaja maupun tidak disengaja.

Tidak seperti model lainnya yang bertumpu pada faktor pengaruh sebagai faktor pengaruh, model dari Charles O. Jones mengacu pada tiga aktivitas utama sebagai variable penentu keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Interpretasi, 2) Organisasi, 3) Aplikasi (Kadji, 2015). Bagi Jones, implementasi tidak hanya difokuskan pada hasilnya saja, namun juga dengan proses kegiatan itu sendiri (Khaidir, 2017).

a. Organisasi

Variable ini berhubungan dengan kondisi dari pihak pelaksana melaksanakan implementasi kebijakan publik. Pemerintah desa harus disiapkan sebelum kebijakan berjalan dengan berbagai pertimbangan agar keberhasilan implementasi dapat berjalan sukses.

b. Interpretasi

Variabel ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan publik diperkenalkan dan dijelaskan, baik dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Interpretasi didukung dengan kualitas komunikasi yang baik supaya menjabarkan suatu kebijakan abstrak menjadi lebih operasional yang dapat dipahami dengan mudah.

c. Aplikasi

Variable ini berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan perencanaan implementasi yang sudah ditetapkan tersebut ke dalam aksi nyata. Pelaksanaan didukung dengan kualitas kemampuan organisasi yang baik dan kualitas intrepertatif

yang jelas agar kebijakan dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.

Berdasarkan model implementasi yang telah dijabarkan di atas, peneliti menggunakan model implementasi dari Charles O. Jones dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih model implementasi dari Charles O. Jones adalah karena menurut peneliti, model implementasi Charles O. Jones termasuk kedalam model implementasi kebijakan dengan aliran top-down. Model implementasi top-down berfokus pada keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pihak pelaksana pada level di bawahnya (Agustino, 2006). Hal ini sesuai dengan kebijakan sistem informasi desa berbasis website OpenSID yang termasuk ke dalam kebijakan top-down karena berfokus pada bagaimana pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Selain itu, yang membedakan model implementasi Charles O. Jones dengan model lainnya adalah model implementasi Charles O. Jones mengacu pada proses tahapan dalam implementasi kebijakan sehingga sesuai dengan kebijakan pelayanan publik yang dilakukan langsung kepada masyarakat seperti sistem informasi desa berbasis OpenSID yang dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan organisasi, interpretasi kebijakan sampai pengaplikasian implementasi kebijakan.

2.3 *E-government*

2.3.1 *Pengertian E-government*

E-government mencakup dari penggunaan teknologi informasi dalam pergerakan informasi yang menggantikan cara tradisional sampai penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberi manfaat pada interaksi antara pemerintah,

masyarakat, mitra bisnis dan staf. Dari sini, *e-government* diartikan sebagai komputerisasi terhadap prosedur yang awalnya berbasis kertas dengan gaya kepemimpinan baru, penentuan keputusan dan strategi baru, serta cara baru untuk mengatur dan menyampaikan informasi antara pemerintahan, masyarakat, mitra bisnis dan staf (Solinthone & Rummyantseva, 2016).

Secara tradisional, warga negara berinteraksi dengan badan pemerintah di kantor pemerintahan dan harus menunggu lama dalam mengurus keperluannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, pusat layanan pemerintah mulai meningkatkan fasilitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah penyelenggaraan serta mewujudkan *good governance*. Pemerintah dapat meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan dan meningkatkan partisipasi warga. Warga tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kantor pemerintah serta menunggu lama dalam mengurus keperluannya. Dengan begitu, konsep *e-government* telah menarik perhatian administrasi publik karena efisiensi dan efektivitas yang dihasilkan. Melalui *e-government*, pemerintahan menerima berbagai manfaat seperti efisiensi waktu dan biaya serta memecahkan masalah “pita merah” dalam birokrasi publik (Altameem dkk., 2006)

Ruang dari *e-government* mencakup berbagai jenis interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak, antara lain : 1) interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizen*), 2) interaksi antara pemerintah dengan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*), 3) interaksi antar sesama pemerintah (*G2G-inter-agency relationship*), 4) interaksi antara karyawan di pemerintahan, dan 5) interaksi antara pemerintah dan Lembaga non-profit (*G2N-government to non-profit*) (Indrajit, 2002).

Konsep ini telah sukses diterapkan di negara-negara maju. Di sana, *e-gov* menjadikan interaksi birokrasi dengan masyarakat terjalin lebih akrab. Oleh karena itu, konsep ini kemudian diterapkan di negara berkembang (Hiplunudin, 2017).

Di Indonesia sendiri, perkembangan *e-government* baru muncul pada awal periode 1990-an. Kemudian muncul undang-undang yang mengatur penerapan *e-government* yaitu Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Terdapat strategi pokok pemerintah dalam peraturan ini, antara lain :

- a. Pengembangan sistem pelayanan yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi masyarakat
- b. Penataan kegiatan kerja dan sistem manajemen baik pemerintah daerah maupun pusat yang berbasis pada elektronik secara menyeluruh
- c. Teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pemerintah
- d. Adanya intervensi peran-serta industri teknologi informasi dalam kegiatan pemerintah
- e. Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dan peningkatan e-literacy dalam masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengembangan yang sistematis secara bertahap dan terstruktur.

2.3.2 Tujuan *E-government*.

Tujuan pengembangan *e-government* berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* (Buchari, 2016) antara lain :

- a. Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik agar penyelenggaraan tersebut lebih efektif dan efisien.
- b. Membentuk sistem manajemen yang efisien dan transparan serta memperlancar transaksi pada pelayanan publik.

2.3.3 Indikator keberhasilan pembangunan *e-government*

Menurut Koswara, keberhasilan pembangunan *e-government* diukur dari 5 (lima) komponen dasar antara lain (Buchari, 2016) :

- a. Perangkat keras yang terdiri atas perangkat komputer, sistem telekomunikasi dan sistem jaringan.
- b. Perangkat lunak yang terdiri atas aplikasi komputer, sistem operasi dan bahasa pemograman
- c. Data yang terdiri dari gambar, suara, video dan data spatial.
- d. Prosedur seperti kemampuan menginstal perangkat lunak sehingga membutuhkan dokumen pendukung dalam melaksanakan pekerjaannya.
- e. Sumber daya manusia yang terdiri dari keahlian menganalisa sistem.

2.3.4 Faktor penting dalam penerapan *e-government*.

Adapun faktor penting dalam penerapan *e-government*, antara lain (Altameem dkk., 2006):

- a. Strategi, setiap proyek membutuhkan pengembangan strategi untuk memotivasi organisasi dalam melaksanakan pencapaian tujuan.
- b. Dukungan Manajemen Puncak, suatu proyek harus memiliki dukungan kuat dari manajemen puncak. Dengan adanya dukungan, implementasi *e-government* dapat menghindari berbagai hambatan seperti perubahan.
- c. Kepemimpinan, keberhasilan *e-government* membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang dapat mengatur agenda implementasi yang lebih luas.
- d. *Citizen-Centric*, masyarakat memiliki hak yang jauh melampaui hak pelanggan dalam sektor swasta. Organisasi swasta tidak perlu memanggil pelanggan untuk menawarkan produk dan jasanya. Sebaliknya organisasi public harus melayani masyarakat 24 jam sehari. Oleh karena itu, pelayanan *e-government* harus sedemikian

rupa dilakukan untuk memuaskan masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

- e. Pendanaan, pendanaan dapat diibaratkan sebagai pengikat antara staf, infrastruktur dan lain-lain dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pendanaan sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik.

2.3.5 Manfaat penerapan *e-government*

Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik dimaksudkan untuk penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat *e-government* diidentifikasi sebagai berikut (Solinthone & Rummyantseva, 2016) :

- a. Pengurangan waktu, tenaga, dan biaya pelanggan dan organisasi.
- b. Peningkatan pelayanan dan kepuasan warga.
- c. Peningkatan keterampilan TIK pengguna, pengetahuan internet dan
- d. Penciptaan peluang bisnis dan pekerjaan baru.

2.3.6 Tantangan dalam penerapan *e-government*

Menurut Prihanta, Tantangan dalam penerapan *e-government* antara lain (Buchari, 2016) :

- a. E-Leadership, tingkat inisiatif kepemimpinan pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
- b. Infrastruktur jaringan informasi, mencakup kondisi infrastruktur, akses kualitas, biaya akses, telekomunikasi, dan lingkup.
- c. Pengelolaan informasi, terkait dengan kualitas pengelolaan informasi
- d. Lingkungan bisnis, kondisi pasar yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi.
- e. Masyarakat dan sumber daya, peleburan teknologi dan informasi kedalam masyarakat dengan melalui sosialisasi

2.4 Sistem Informasi Desa dan Website OpenSID

2.4.1 Sistem Informasi Desa

Sistem merupakan kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur dalam membantu suatu kesatuan demi mencapai tujuan. Sedangkan informasi merupakan data yang diolah menjadi lebih berguna bagi penerimanya dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi informasi yang merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (Anggraeni & Irviani, 2017).

Menurut Anggraeni dkk (2017), sistem informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Informasi yang disajikan bersifat baru bagi penerima
- b. Informasi dapat diperbaharui dengan menambah informasi yang sebelumnya telah ada
- c. Informasi dapat dikoreksi dari informasi yang salah sebelumnya
- d. Informasi dapat dipertegas dari informasi yang telah ada sebelumnya

Sistem informasi desa (SID) merupakan alat bantu bagi desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di desa (Fitri dkk., 2017). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyediakan Sistem Informasi Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem informasi desa berguna untuk efisiensi dalam kegiatan pelayanan desa, pengelolaan berbagai data desa, pemanfaatan berbagai data desa serta mewujudkan fungsi transparansi pemerintah desa.

Sistem informasi desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86. Sistem informasi desa meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sedangkan sistem data desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Data tersebut dapat diakses oleh masyarakat desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam rangka memajukan pembangunan kawasan perdesaan.

Desa merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administrasi di Indonesia. Dengan berjalannya perkembangan teknologi dan informasi, desa dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa. Pengelolaan data administrasi secara konvensional memiliki beberapa masalah seperti *human error*, pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi desa berbasis *e-government* dapat meringankan beberapa kekurangan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa (Fitri dkk., 2017).

2.4.2 Website OpenSID

Website merupakan himpunan dari beberapa halaman *web* dalam sebuah domain yang mengandung informasi yang saling terhubung satu sama lain dengan *hyperlink*. Dapat dikatakan bahwa perkembangan website turut mengambil bagian dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan website sangat cepat karena mengaksesnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hampir 80% layanan internet didominasi oleh website. Sampai saat ini, jumlah website di seluruh dunia sudah menyentuh angka miliaran. Karena cepatnya perkembangan internet, bukan tidak mungkin layanan internet juga menyediakan layanan untuk membantu kehidupan manusia lainnya seperti *e-commerce*, *e-banking*, *e-learning* bahkan *e-government* (Yuhefizar dkk., 2009).

Desa tidak lepas dari pembangunan *e-government* di Indonesia. OpenSID sendiri merupakan suatu sistem informasi desa yang dirancang dan dikembangkan secara terbuka oleh Komunitas Peduli Sistem Informasi Desa (Jalma dkk., 2019). OpenSID digunakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengelola informasi kantor desa supaya mendukung fungsi dan tugas kantor desa seperti administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, layanan publik, dan sebagainya (Shoffa dkk., 2020).

OpenSID dirilis pada Mei 2016 serta dikembangkan menggunakan SID dari Combine Resource Institution (CRI) sejak tahun 2009 (panduan.opendesa, 2022). CRI sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi (combine, 2013). Sampai saat ini, desa pengguna website OpenSID sudah mencapai 6.528 desa dari total 18.836 desa (pantau.opensid, 2023).

Fitur website OpenSID menyediakan berbagai fitur antara lain (opensid, 2022) :

- a. Administrasi kependudukan
Fitur yang memuat pengolahan data kependudukan desa seperti data keluarga, penduduk, data pemilih desa dan lain-lain.
- b. Laporan penduduk
Fitur yang memuat pembuatan laporan jumlah penduduk, kepemilikan KTP dan KK dan lain-lain.
- c. Data keluarga
Fitur yang memuat pengelompokkan data keluarga yang digunakan pemerintah dalam memantau untuk menargetkan program dari pemerintah.

d. Mutasi penduduk

Fitur yang memuat pendataan perubahan jumlah penduduk desa jika terjadi penambahan atau pengurangan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

e. Statistik penduduk

Fitur yang memuat pelayanan pengolahan data penduduk dan pengelompokkan data penduduk berdasarkan usia, Pendidikan, gender dan lain-lain.

f. Fitur layanan terpadu

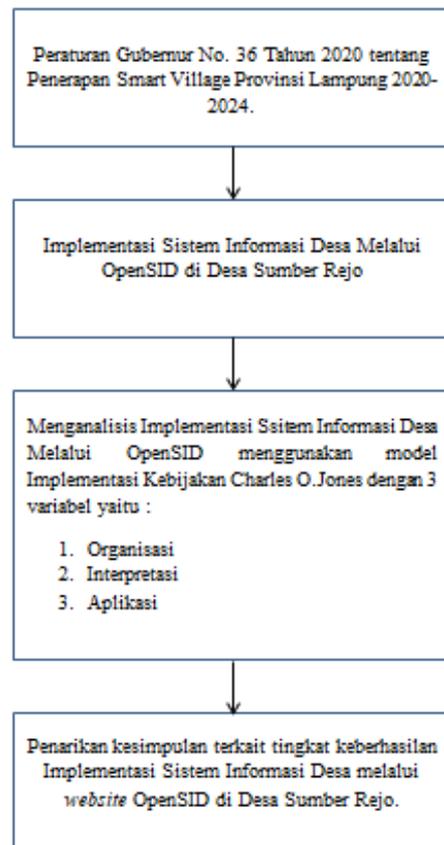
Fitur yang memuat pelayanan pembuatan surat secara otomatis tanpa harus mengetik secara manual di computer.

2.5 Kerangka Berpikir

Menanggapi pemerataan pembangunan berbasis teknologi, pemerintah gubernur lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung No 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *smart village* Provinsi Lampung 2020-2024 dimana terdapat program Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* OpenSID di dalamnya. Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID membantu pelayanan yang berhubungan dengan informasi di desa seperti mengurus keperluan dokumen yang membutuhkan informasi desa dan transparansi pemerintah lebih efektif dan efisien karena kegiatan sudah berbasis komputer. Namun terjadi permasalahan dalam implementasi kegiatan Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID. Masyarakat masih tidak yang mengetahui adanya program pelayanan publik ini karena kurangnya sosialisasi terkait progam tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Sumber Rejo melaksanakan implementasi Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID melalui teori Charles O Jones dengan variabel organisasi, interpretasi dan aplikasi untuk mengetahui keberhasilan implementasi supaya meningkatkan kualitas pelayanan dari Pemerintah Desa

Sumber Rejo.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti memberikan penggambaran dari suatu masalah. Penelitian ini dipaparkan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dari wawancara dan dokumentasi secara objektif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Oleh karena itu, tipe penelitian ini sesuai dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) melalui *Website* OpenSID Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur”.

3.2 Fokus Penelitian

Perumusan fokus penelitian penting untuk menentukan arah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan penelitian pada proses implementasi Sistem Informasi Desa berbasis OpenSID di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengeksplorasi topik ini dari sudut pandang Ilmu Sistem Informasi atau Teknik Informatika. Penelitian ini memiliki keunikannya sendiri karena penulis tidak menemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas implementasi Sistem Informasi Desa berbasis website OpenSID. Lebih lanjut, penelitian ini ingin memperluas wawasan dalam Ilmu Administrasi Negara dengan fokus pada aspek yang spesifik, yaitu sistem informasi desa berbasis website. Perhatian terhadap program *smart village*, yang mencakup website OpenSID, dianggap relevan karena masih tergolong

baru, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Lampung No 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024 pada tahun 2020. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Desa dalam konteks *website* OpenSID di era *Smart Village*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (1996). Menurut peneliti, model ini dinilai relevan pada objek penelitian karena variabel dari Charles O. Jones relevan dengan topik penelitian implementasi implementasi Sistem Informasi Desa dalam konteks *website* OpenSID. Model Jones berfokus pada tahapan kegiatan implementasi dari suatu kebijakan serta relevan dengan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen pelayanan seperti pelayanan Sistem Informasi Desa berbasis OpenSID. Model Charles O. Jones memiliki 3 variabel sebagai patokan utama penelitian, yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi (Kadji, 2015).

1. Organisasi

Variable ini berhubungan dengan kondisi dari pihak pelaksana melaksanakan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan didukung dengan kesiapan kualitas dari para pelaksana dengan tugas, posisi dan fungsi yang tepat dengan sumber daya yang memadai. Menurut Edwards 3 (1980), sumber daya meliputi staf yang dengan keahlian yang tepat, informasi yang relevan dalam kegiatan implementasi dan siapa saja yang terlibat, kewenangan yang mengarahkan pada tujuan yang telah ditentukan, fasilitas seperti persediaan, peralatan, bangunan, dana dan bangunan (Kadji, 2015). Pada penelitian ini berhubungan dengan bagaimana kualitas kesiapan Pemerintah Desa Sumber Rejo yang mencakup ketepatan tugas, posisi dan fungsi serta kesiapan sumber daya di dalamnya.

2. Interpretasi

Variabel ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan publik diperkenalkan dan dijelaskan, baik dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi dinilai dengan berfokus pada bagaimana proses interaksi pada program Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID dari Pemerintah Gubernur Lampung kepada Pemerintah Desa Sumber Rejo serta dari Pemerintah Desa Sumber Rejo kepada masyarakat Desa Sumber Rejo.

3. Aplikasi

Variable ini berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan perencanaan implementasi yang telah ditetapkan tersebut ke dalam aksi nyata. Pelaksanaan didukung dengan kualitas kemampuan organisasi yang baik dan kualitas intrepertatif yang jelas agar kebijakan dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Penelitian ini membahas terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID Desa Sumber Rejo. Pelaksanaan kebijakan mencakup bagaimana sikap dan komunikasi kerja sama baik sesama pegawai pemerintah desa Sumber Rejo maupun pemerintah desa dengan masyarakat desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih menjadi objek penelitian adalah Balai Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena instansi terkait memiliki kewenangan dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* OpenSID di Desa Sumber Rejo. Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* OpenSID di Desa Sumber Rejo termasuk kedalam Peraturan Gubernur Lampung No 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian pra-riset, peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat desa tidak tahu terkait adanya Sistem Informasi Desa berbasis *website* karena kurangnya sosialisasi. Desa

Sumber Rejo menjadi desa yang aktif dalam mengelola website OpenSID dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Waway Karya. Namun pemerintah desa sumber rejo ragu mengimplementasikan sebagai pelayanan langsung ke masyarakat karena minimnya skill yang disebabkan oleh kurangnya bimbingan lanjutan pasca BIMTEK.

3.4 Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh langsung yaitu teknik wawancara dengan informan terkait dan dokumentasi langsung ke lapangan. Dalam hal ini, wawancara dan dokumentasi dilakukan terhadap informan dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa berbasis website OpenSID di desa Sumber Rejo.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah ada sebelumnya sebagai data pendukung. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengumpulan data-data tertulis, dokumen dan arsip yang diperoleh dari Balai Desa Sumber Rejo seperti gambaran umum Desa Sumber Rejo, dasar hukum penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sumber Rejo, struktur organisasi Pemerintah Desa Sumber Rejo, visi dan misi Pemerintah Desa Sumber Rejo, dan jumlah penduduk Desa Sumber Rejo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur penting dalam proses sebuah penelitian adalah teknik penelitian. Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi

(Ghony & Almanshur, 2016). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan informan atau *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan seleksi khusus atas pertimbangan tertentu. Melalui purposive sampling, peneliti menentukan para informan yang diwawancarai sesuai dengan pertimbangan bahwa para informan tersebut adalah pihak yang terlibat dalam implementasi sistem informasi desa berbasis *web* OpenSID.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Edi Kurniawan	Sekretaris Desa Sumber Rejo
2.	Ahmad Kurniawan	Operator Desa Sumber Rejo
3.	Muharam	Kepala Urusan Umum Desa Sumber Rejo
4.	Yohanes Sulistiono, SE., MM	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas PMDT Provinsi Lampung
5.	Heri Setiawan, S.Kom	IT Operation DJCorp
6.	Kaib Murod	Masyarakat
7.	Titin Suhartini	Masyarakat
8.	Saoda	Masyarakat
9.	Widyawati	Masyarakat
10.	Partiyem	Masyarakat
	Jumlah	10

Sumber: Diolah oleh peneliti

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa dokumen, buku, catatan, koran, foto kegiatan, majalan dan sebagainya yang berkaitan dengan topic permasalahan (Arikunto, 2010). Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data-

data tertulis, dokumen dan foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian implementasi sistem informasi desa melalui *website* OpenSID di Desa Sumber Rejo. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No	Nama Dokumen
1	Peraturan Gubernur Lampung No 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan <i>Smart village</i> Provinsi Lampung 2020-2024
2	Dokumen Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 141/007/SK/20.2002/2022
3	Dokumen Perjanjian Kerjasama Tim <i>Smart village</i> dengan desa Nomor 001/DJC/CEO/1/2022
4	Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Sumber Rejo Alokasi Penyelenggaraan Kegiatan <i>Smart village</i> dan Honor Op. SIKS-NG

Sumber : Diolah oleh peneliti

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana, teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*) (Mardawani, 2020).

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses penyaringan data, pemusatan data, penyederhanaan data, pengabstraksian data dan transformasi data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya. Reduksi data dilakukan supaya data yang diperoleh menjadi lebih fokus, tajam dan kuat. Peneliti menyaring mana data yang relevan dan diperlukan dalam penelitian peneliti. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi pada

pemerintah Desa Sumber Rejo terkait implementasi kebijakan sistem informasi desa berbasis website di Desa Sumber Rejo.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merujuk pada tahap pengumpulan dan penyusunan informasi yang sebelumnya dipilah sehingga memberikan gambaran penelitian serta pola hubungannya supaya ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Penyajian data berguna untuk memahami hasil analisis dengan lebih mendetil. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam kembali agar mudah dipahami dan mudah untuk disusun sebagai kesimpulan.

3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/ verification*)

Setelah melalui tahap kondensasi data dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan diambil dari informasi yang sebelumnya telah diseleksi dan disajikan secara rinci. Pada penelitian ini, pengambilan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dari teknik wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *web* OpenSID Desa Sumber Rejo.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data berguna untuk menguji keabsahan data, dilakukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moloeng, 2016). Adapun kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pada uji kredibilitas menggunakan triangulasi. Terdapat 3 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi sumber karena sesuai dengan penelitian ini. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa keabsahan informasi dengan

berbagai sumber data yang tersedia yaitu hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan Implementasi Sistem Informasi Desa berbasis *website* OpenSID.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif dimana validitas eksternal dilakukan dengan menunjukkan derajat ketepatan dari hasil penelitian terhadap populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Oleh karena itu, hasil penelitian harus diuraikan secara rinci dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan menggunakan teks, tabel atau gambar sehingga mendapatkan gambaran hasil penelitian yang jelas.

3. Uji Keterandalan (*Dependability*)

Uji keterandalan merupakan pengujian hasil penelitian dengan memeriksa kembali keseluruhan proses penelitian sehingga dibutuhkan diskusi dengan dosen pembimbing. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah hasil penelitian dapat diandalkan atau tidak (Hidayat, 2021).

4. Uji Objektivitas (*Conformability*)

Uji objektivitas dilakukan bersamaan dengan uji keterandalan. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan objektif jika penelitian tersebut telah disetujui pada beberapa penelitian lainnya (Hidayat, 2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait “Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa melalui *Website* OpenSID di Desa Sumber Rejo”, maka kesimpulan ditarik sebagai berikut:

1. Organisasi

Tahap organisasi dilakukan cukup baik. Pemerintah desa dengan cepat membentuk tim *smart village* Desa Sumber Rejo. Pembagian tugas mengikuti tugas anggota pemerintahan desa sebagaimana lazimnya dengan lebih fleksibel. Selain itu, sebagai desa mandiri, pendanaan berasal dari dana desa tahun 2022 yakni sebesar Rp.38.800.000,00 yang membiayai seluruh kegiatan implementasi program *smart village*.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi sudah bagus, baik dari tim *Smart village* maupun dari pemerintah desa. Proses interpretasi dimulai dari sosialisasi awal, pengesahan SK, pelaksanaan BIMTEK, pembagian modul, penyediaan forum grup via *WhatsApp* dan sosialisasi masyarakat desa dilakukan dengan strategi yang yang bagus. Hal ini dapat dilihat dengan hasil interpretasi dari tim *smart village* yang sukses menarik perhatian banyak desa di Lampung termasuk Desa Sumber Rejo serta aparatur desa bisa memahami dengan baik terkait penjelasan-penjelasan program *smart village*. Selain itu, pada sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa membuat masyarakat desa bisa mengetahui adanya program ini dengan baik dan merata.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi telah berjalan baik. Pada segi pembagian kerja, terdapat perukaran tugas dikarenakan beberapa aparatur tidak menguasai kemampuan IT. Meskipun begitu, hal ini tidak menghambat penyelenggaraan implementasi program karena aparatur desa lainnya dengan cepat menggantikannya. Pada segi fasilitas, menurut Operator Desa, fasilitas yang disediakan sudah baik dan tidak ada kerusakan sama sekali. Sedangkan untuk segi pemahaman tugas, aparatur desa terutama Kepala Urusan Umum yang bertugas melayani masyarakat langsung sudah dinilai memahami perannya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh beberapa warga desa yang mengurus keperluan surat menyurat berbasis *Smart village* dimana warga desa merasa terbantu dengan pelayanan pembuatan surat menggunakan *website* OpenSID. Namun untuk honorarium, menurut Operator Desa, besarnya insentif tidak sebanding dengan beban kerja yang dikerjakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kemampuan dasar teknologi informasi sangat penting dalam kegiatan *e-government* seperti *smart village*, oleh karena itu direkomendasikan kepada aparatur Pemerintah Desa Sumber Rejo meningkatkan kemampuan dasar pada pengelolaan teknologi informasi dasar seperti memasukkan data, menyimpan data dan mengelola data. Kemampuan seperti ini sangat penting dalam implementasi *e-government* seperti *smart village* ke depannya.
2. Kepada Tim Smart Village, diharapkan agar segera melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Sumber Rejo. Tindakan monev ini perlu dilakukan untuk menilai pelaksanaan

program untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program smart village di Desa Sumber Rejo.

3. Kepada pemerintah desa sumber rejo, diharapkan agar lebih memperhatikan kelayakan pemberian insentif sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh operator desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Altameem, T., Zairi, M., & Alshawi, S. (2006). Critical Success Factors of E-government : A Proposed Model for E-government Implementation. *2006 Innovations in Information Technology*, 6, 1–5.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Sleman : CV.Andi Offset.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2022). Jumlah Desa Kelurahan. <https://lampung.bps.go.id/indicator/153/228/1/jumlah-desa-kelurahan.html>. Pada 5 Oktober 2022.
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta : PT.Grasindo.
- Beteng, S., Kapantow, G. H. M., & Egam, P. P. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Manado. *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 3, 575–587.
- Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, 18, 225–230.
- Chan, C. M. L., Lau, Y., & Pan, S. L. (2008). E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives. *Government Information Quarterly*, 25(2), 239–255.
- Combine Resource Institution. (2013). <https://www.combine.or.id/>. Pada tanggal 5 Maret 2023.
- Databoks. (2023). Data Jumlah Kota di Indonesia dan Sebarannya. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/data-jumlah-kota-di-indonesia-dan>

- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar : Kedai Aksara.
- Khaidir, A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasinya Di Bidang Pendidikan*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Kemenkeu (2022). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-2022-Bekerja-Dalam-Melindungi-Rakyat>, pada tanggal 28 Januari 2024.
- Koesharijadi, K., Hardiyansyah, H., & Akbar, M. (2019). Implementasi Kebijakan E-government, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3 (1), 39-45.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur kota cimahi. *Sosiohumaniora*, 15 (1), 6-14
- Makinde, T. (2005). Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. *Journal of Social Sciences*, 11(1), 63–69.
- Mardawani. (2020) *Praktis Penelitian Kualitatif : Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman : Penerbit Deepublish.
- Mandagi, M. (2023). *E-government dalam Konteks Pelayanan Publik*. Klaten : Penerbit Lakeisha.
- Moloeng, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A., Zakiyah, W., & Winarso, U. T. (2013). *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif (H. Zarodi & R. Andriono, Ed.)*. Yogyakarta : Merapi Recovery Response (MRR) Sub Project, DR4 Project, UNDP Indonesia.
- OpenSID. (2022). Open <https://opendesa.id/>, Pada tanggal 5 Maret 2023.
- Panduan OpenDesa. (2021). <https://panduan.opendesa.id/id/opensid>. Pada tanggal 5 Maret 2023.
- Pantau OpenSID. (2023). <https://pantau.opensid.my.id/>. Pada tanggal 5 Maret 2023
- Sabatier, P, & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.

- Shoffa, S., Giap, Y. C., Sari, D. P., Rohmah, R., Lestari, V. N. S., Permadi, B., Trinanda, O., & Sari, A. Y. (2020). *Abdimas untuk negeri : Implementasi Kinerja Dosen dalam Bentuk Pengabdian di Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru.
- Solinthone, P., & Romyantseva, T. (2016). E-government Implementation. *MATEC Web of Conferences*, 76, 1–11.
- Statista. (2022). <https://www.statista.com/statistics/271411/number-of-internet-users-in-selected-countries/#statisticContainer>, Pada tanggal 4 Oktober 2022
- Suara Lampung. (2022). <https://lampung.suara.com/read/2022/02/20/060000/dana-desa-di-lampung-pada-2022-capai-rp23-triliun-paling-tinggi-diterima-bandar-lampung>. Pada tanggal 28 Januari 2024.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suryani, A. D. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *JPALG*, 3(1), 52–69.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Nusamedia.
- Van Meter, DS., & Van Horn, CE. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration And Society*, 6(4), 445-488.
- Website Resmi Desa Balantang. (2023). <https://profil.digitaldesa.id/balantang-luwutimur/berita/mmd-musyawah-masyarakat-desa>. Pada tanggal 29 Oktober 2023
- Website Resmi Desa Sumber Rejo. (2023) <https://sumberrejo-desa.id/>, Pada tanggal 30 Januari 2023.
- Wheat, D. (2010). What Can Sistem Dynamics Learn From the Public Policy Implementation Literature? *Sistems Research and Behavioral Science*, 27, 425–442.
- Yuhefizar., Moodoto, H.A., Hidayat, R. (2009). *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management Sistem Joomla (CMS)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Yunus, M., Aljurida, A. (2021). *Hitam Putih Kebijakan Publik di Indonesia*. Indramayu : Penerbit Adab.

Perundang-undangan :

Instruksi Presiden Nomor 3/Inpres/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.

Peraturan Gubernur Lampung No 36/Pergub-Lampung/2020 Tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024

Undang-Undang No 6/ UU-RI/2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84/Permendagri/2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sekretariat Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah Desa. 2023. Laporan Akhir Tahun Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2018-2023.

Pemerintah Desa. 2023. Data Penduduk Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Tahun 2022.

Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 141/002-008/SK 20.2001/2022/SK Kepala Desa Sumber Rejo/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sumber Rejo.

Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 141/007/SK/20.2002/2022/SK Kepala Desa Sumber Rejo/2022 Tentang Pelaksanaan Smart Village

Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B/653/26/SK/2011/SK Bupati Lampung Timur/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumber Rejo.